

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA
DI KECAMATAN TELUK BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Legiman

paklek05101969@gmail.com

Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir

Indra Prasetyo

Sri Mulyani

Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation of community empowerment programs in development towards independent villages; and knowing the factors that influence the implementation of community empowerment programs in the development towards Maju Indragiri Hilir Jaya Village in Teluk Belengkong District, Indragiri Hilir Regency. The research uses an approach approach with a research focus on the implementation of community empowerment programs in development towards independent villages consisting of planning, organizational actors, preparation of budget support, community participation and program results and obstacles and efforts to overcome obstacles in implementing community empowerment programs in development towards independent village in Teluk Belengkong District, Indragiri Hilir Regency. Research informants were selected purposively by involving nine key figures. The results showed that the implementation of community empowerment in the implementation of the Indragiri Hilir Jaya Maju Village Program which was carried out in Teluk Belengkong District required self-development, direct assistance, capacity building for human resources, and the development of programs that were socialized for the purpose of village self-reliance in an effort to raise the spirit of community self-help cooperation.

Keywords: *community empowerment, village development*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri; dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian pada implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri yang terdiri dari perencanaan, organisasi pelaku, persiapan dukungan anggaran, partisipasi masyarakat dan hasil-hasil program dan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir. Informan penelitian dipilih secara purposif dengan melibatkan sembilan tokoh kunci. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang dilakukan di Kecamatan Teluk Belengkong membutuhkan adanya pengembangan diri, bantuan langsung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan program yang disosialisasikan untuk tujuan kemandirian desa upaya membangkitkan semangat gotong-royong swadaya masyarakat.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Menurut Kartasasmita (1996), memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konteks pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat haruslah diawali dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau dikembangkan

Dalam kerangka pemikiran tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju Desa Mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam memacu percepatan pembangunan dan sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan di Indragiri Hilir maka Pemerintah Daerah telah menetapkan suatu kebijakan

pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui suatu gerakan pembangunan yang dinamai Gerakan Pembangunan Desa Mandiri. Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dilakukan secara terpadu, sinergis dan partisipatif dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada semua tingkatan pemerintahan, operasional dan substansi pembangunan.

Hasil penelitian ini secara teoretik diharapkan dapat memperkaya khasanah teoretis yang berkenaan dengan peran birokrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hasil kajian terhadap dampak kebijakan pemberdayaan juga diharapkan dapat memperkaya teori yang berkaitan dengan indikator yang digunakan dalam pengukuran masyarakat yang berdaya, misalnya: kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, kemampuan melakukan *bottom-up planning*, dan sebagainya. Di samping itu, pengembangan suatu model pemberdayaan yang ideal juga diharapkan akan memperkaya teori-teori tentang *people empowerment*.

TINJAUAN TEORETIS

Dari konsep kebijakan ini dapat diberikan definisi yang menyangkut kebijakan dan kebijakan publik (kebijakan negara). Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Anderson, 1978 : 8). Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan berikut ini : "*Kebanyakan atau kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan*". (Fredrich dalam Wahab, 1997:3)

Sedangkan kebijakan negara didefinisikan sebagai antar hubungan di

antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya (Jones, 1979:19), yang diperjelas oleh Dye (1978:8) bahwa kebijakan negara ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini akan memasukkan pula tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai atau pemberian izin yang biasanya tidaklah dianggap sebagai masalah-masalah kebijakan. (Wahab, 1997:4). "*Government policy is a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve* (Jenkins dalam Wahab, 1997:15).

Tujuan pokok analisis kebijakan negara (*public policy analysis*) adalah untuk mencoba merangkum gagasan-gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin (sosiologi, politik, ekonomi, psikologi sosial dan antropologi) dalam rangka menginterpretasikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan pemerintah. (Wahab, 1990:21). Berikut dikemukakan definisi dari analisis kebijakan oleh beberapa penulis. Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*) : suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas-aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linear, dan pada dasarnya bersifat politis". (Dunn, 2015:10).

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika Wahab (1997:59) mengatakan bahwa "implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan". Kemudian Wahab mengatakan : "Implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dektif Presiden)", (Wahab, 1997:64). "Selain itu makna implementasi dikatakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya ntaupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada mas atau kejadian-kejadian ". (Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab, 1997: 65).

Friedmann (1992) menawarkan konsep atau strategi pembangunan yang populer disebut dengan *empowerment* atau pemberdayaan. Konsep pemberdayaan ini adalah sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi dalam mengambil keputusan di suatu kelompok masyarakat yang dilandaskan pada sumberdaya pribadi, bersifat langsung, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokus utama pemberdayaan, menurut Friedmann, adalah sumberdaya lokal, namun bukan berarti mengabaikan unsur-unsur lain yang berada di luar kelompok masyarakat, bukan hanya ekonomi akan tetapi juga politik, agar masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang seimbang, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase (Prijono dan Pranaka, 1996) yaitu:

(a) Fase Inisiasi adalah bahwa semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, dan masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah (b) Fase Partisipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. (c) Fase Emansipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatori ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri (*fase emansipatoris*).

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, di mana penasihat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada proses pendampingan kepada kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumberdaya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut. Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya

bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumberdaya tidak sama.

Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk "penyadaran" secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

Untuk melaksanakan evaluasi apakah proyek yang telah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu telah sungguh mendatangkan perbaikan yang sesuai dengan harapan warga masyarakat, perlu dilakukan suatu penelitian. Dua metoda penelitian evaluatif yang bersifat *bottom-up* adalah *rapid rural appraisal* (RRA), dan *participatory rural appraisal* (PRA).

Dengan memperhatikan berbagai pandangan termasuk bias-bias terhadap konsep pemberdayaan, maka dapat dikemukakan beberapa langkah strategis yang harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan. *Pertama*, peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*). Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Karena itu kebijaksanaan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sangat penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi rakyat ini. Pemilikan tanah yang makin mengecil (marjinalisasi) harus dicegah. Persoalan ini tidak mudah, karena menyangkut budaya dan hukum waris. Namun, dalam rangka proses modernisasi budaya masyarakat, kebiasaan untuk membagi tanah semakin kecil sebagai warisan harus dihentikan. Untuk dapat melakukan hal itu memang harus ada alternatif, antara lain berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisien (misalnya: *mixed farming, mixed landuses*), penciptaan lapangan kerja perdesaan di luar pertanian (agroindustri dan jasa),

program transmigrasi dan sebagainya. Dalam rangka ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas (dan dengan demikian nilai aset) lahan harus ditingkatkan, misalnya dengan pengairan, pemupukan, diversifikasi usaha tani, atau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nilai komersial yang tinggi). Di samping itu akses masyarakat kepada lingkungan hidup yang sehat yang tidak tercemar akan mengurangi beban dan menambah produktivitas masyarakat.

Masalah yang paling mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses ke dalam dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Permasalahannya adalah adanya prasyarat perbankan yang membuat masyarakat lapisan bawah umumnya dinilai tidak *bankable*. Keadaan ini menyebabkan terbatasnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang memerlukan kredit. Akhirnya, modal makin banyak terkonsentrasi pada sektor modern, khususnya pada usaha besar, yang berakibat makin lebarnya jurang kesenjangan. Karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat ke dalam modal. Untuk itu memang diperlukan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional.

Rendahnya kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan perlu segera ditindaklanjuti dengan suatu program pemberdayaan masyarakat desa. Upaya mempercepat pembangunan, khususnya di pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diperlukan penguatan secara sistematis kelembagaan yang ada untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan dan melaksanakan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya atau yang sering disingkat dengan Program DMIJ. Panduan utama yang digunakan adalah Petunjuk Teknis Operasional 2014. Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017, dengan berbagai masukan dari lapangan, hasil konsolidasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Riau, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan berbagai pihak, maka pada tahun 2015, 2016, 2017. Pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang baru sebagai penyempurnaan dari Petunjuk Teknis Operasional sebelumnya. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Operasional ini dapat menjawab kebutuhan pembangunan desa.

Dalam pasal 1 angka 6 dijelaskan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya selanjutnya disingkat DMIJ adalah Program Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1 angka 7)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. (Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1 angka 11,12,13,16)

Desa mandiri adalah adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan

melaksanakan pembangunan desanya. Selain itu juga dapat diartikan desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi terbentuknya desa mandiri: (1) Potensi Sumber Daya Manusia (2) Potensi Sumber Daya Alam (3) Pasar (4) Kelembagaan dan Budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun definisi pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moleong, 2000:3). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2008:63). Pendapat Cronbach dkk, dalam Wahab (1997:11) yang menyatakan bahwa "metode kualitatif yang fleksibel lebih cocok dan memenuhi kebutuhan bagi evaluasi pelaksanaan kebijakan daripada metode kuantitatif.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri di Kecamatan Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir serta kendala dan upaya mengatasi kendala dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri di Kecamatan Belengkong

Kabupaten Indragiri Hilir. Informan awal penelitian ini dipilih secara purposif (*purposif sampling*), yaitu ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti memilih 2 orang LPM, 2 orang BPD, 1 orang POKJA, 1 orang Kades serta 3 orang tokoh masyarakat karena dipandang sangat mengetahui secara administrative dan operasional pelaksanaan Program.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Pengamatan (Observasi) dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif, analisis ini dinyatakan secara tertulis dan lisan. Analisis digunakan untuk membatasi atau menyempitkan penemuan yang ada untuk menjadi data yang lebih berarti. Analisis dilakukan setelah melalui tahapan pengumpulan data. Analisis data ini berproses secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul. Analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan, yaitu: pencatatan, pengklasifikasian, dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan hingga tingkat desa. Implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi berupa perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pemberdayaan Desa adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan prakarsa dan kreativitas desa agar mampu dan mandiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peningkatan fungsi kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan mekanisme kerja yang disajikan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Orientasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri untuk memperoleh data di lapangan, koordinasi dengan perangkat desa.
2. Pencanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Hasil orientasi yang dilakukan disesuaikan untuk mencanangkan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Kaitan dengan program hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi sebagai berikut : (1) kegiatan pembangunan (2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan (3) Kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha. (*wawancara, 2018*)

- a. Pelaksanaan lokakarya, seminar dan pelatihan Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Pelaksanaan kegiatan lokakarya, seminar dan pelatihan ditujukan untuk lebih mendekatkan masyarakat kepada program yang akan diimplementasikan

Pelaksanaan pembentukan kelompok kerja dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Teluk Belengkong Kelompok kerja yang dibentuk adalah calon-calon kelompok usaha yang akan dibina dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

- b. Pelaksanaan Block Grant

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh pelaksana dan masyarakat secara partisipatif untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- c. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana yang disalurkan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan dana bantuan langsung pemerintah yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat Kecamatan Balengkong. Dari informan diperoleh data berikut :

“Alokasi Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten :

- Untuk Desa Maju/Mandiri : Rp. 1.200.000.000,-/Desa

- Untuk Desa Swasembada : Rp. 750.000.000,-/Desa

- Untuk Desa Swakarya : Rp. 500.000.000,-/Desa

- Untuk Desa Swadaya : Rp. 350.000.000,-/Desa”.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat mandiri di Kecamatan Balengkong mencakup : (1) Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya di Kecamatan Teluk Belengkong. (2) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini kepada masyarakat Kecamatan Teluk Belengkong. (3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia (4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Teluk Belengkong.

Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri merupakan program yang mendukung tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan pada masa mendatang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka pemerintah membuat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dengan harapan pemberdayaan bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif. Oleh karena itu perlu sekali dorongan untuk swadaya gotong royong masyarakat sehingga hasilnya overprestasi.

Salah tujuan Program pemberdayaan desa adalah memberikan peranan terhadap masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan secara parsipatif, guna menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara perorangan dan berkelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Mengikutsertakan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan, yang berpegang teguh kepada musyawarah sebagai keputusan tertinggi, di bawah koordinasi, arahan dan bimbingan kelembagaan desa (Kepala Desa, LPM dan BPD).

Namun dalam implementasinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana pendapat George Edward III maka yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

a. Faktor Komunikasi

Kegiatan komunikasi yang dilakukan perangkat desa, BPD dan LMD selaku implementor program berbentuk sosialisasi program ke masyarakat. Bila sosialisasinya dapat dipahami oleh masyarakat maka tujuan program akan

lebih mudah dicapai. Demikian pula sebaliknya bila sosialisasi yang dilakukan tidak dapat dipahami oleh masyarakat maka tujuan program pun akan sulit dicapai.

Komunikasi juga diperlukan untuk koordinasi, baik koordinasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal dilakukan dengan personel yang ada dalam struktural program sedangkan komunikasi eksternal dengan struktural diatas desa yaitu kecamatan serta komunikasi yang dilakukan dengan warga masyarakat desa.

Dengan demikian untuk implementasi program pemberdayaan di Kecamatan Balengkong diperlukan pemimpin yang memiliki komunikasi bagus. Untuk Kepala kelompok kerja program pemberdayaan Desa dipilih dari Kepala Dusun. Dengan kemampuan Kepala Dusun maka komunikasi pelaksanaan program tidak ada kendala.

b. Faktor Sumber Daya

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif

Kualitas SDM implementor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong masih ada yang kurang baik dan tidak baik kualitasnya. Perlu usaha yang selektif untuk memilih implementor Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa SDM dalam rangka implementasi program pemberdayaan masyarakat harus dipilih dengan baik.

Kendala yang ada dalam implementasi program ini adalah persepsi dan kemauan masyarakat untuk terus meningkatkan program sehingga tujuan program yang ingin membangkitkan

kembali rasa kebersamaan dan gotong royong serta menggali swadaya dan kreatifitas masyarakat masih kurang. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

"sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya paham program pemberdayaan masyarakat, mereka hanya senang memperoleh bantuan namun enggan dimintai solidaritas untuk menambah dana swadaya pembangunan agar hasil pembangunan dapat bertambah lebih cepat".

Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan kualitas SDM. Perbaikan kualitas tersebut dilakukan dengan mengikutkan perangkat desa dalam program pendidikan latihan, mengikuti sosialisasi program di kecamatan dan adanya tim pendamping program. Semua upaya tersebut sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu program pemberdayaan direkomendasi adanya dana yang disalurkan untuk peningkatan SDM aparatur. Diatur juga sosialisasi program ke desa oleh kecamatan serta disediakan tim pendamping perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Disamping SDM ada juga sumber daya yang lain yaitu sumber dana financial. Sumber dana program pemberdayaan desa adalah dari APBD dan APBN. Dana ini dialokasikan ke desa-desa untuk percepatan pembangunan. Harapannya adalah dorongan untuk swadaya gotong royong masyarakat desa. Namun kenyataannya upaya untuk menggali sumber dana dari masyarakat kurang optimal karena masyarakat cenderung apatis dan tidak peduli dengan

upaya pengembangan pembangunan di desa agar menjadi desa mandiri.

Dari pernyataan dari responden Sumber dana swadaya masyarakat masih belum bisa dicapai secara optimal. Dengan demikian sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi program di Kecamatan Kempas masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk menggali sumber daya finansial swadaya masyarakat adalah dengan sosialisasi program, cara bersosialisasi yang berkualitas, kuantitas komunikasi, perbaikan pendidikan dan perbaikan perekonomian. Bentuk nyata upaya adalah bantuan pengembangan pendidikan melalui anggaran dana desa dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Faktor Disposisi

Perlu diperjelas bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Masih ada disposisi implementor kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya upaya memperbaiki watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Karena dimensi tersebut merupakan dimensi disposisi implementor program. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melibatkan sebagian masyarakat terlibat dengan program pemberdayaan ini yang disebut dengan POKJA (kelompok kerja).

Dengan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan kepala desa sebagai figur sentral implementasi program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya dapat dikatakan mempunyai disposisi yang baik. Akan tetapi dari sudut pandang masyarakat, aparatur desa dan implementor kebijakan pemberdayaan yang lain dianggap masih belum jujur.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kelembagaan dan SOP (*Standart Operating Prosedure*). Kelembagaan dan SOP program pemberdayaan masyarakat desa sudah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. Untuk program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya ditingkat desa terdiri dari : Kepala desa, Sekretaris desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kelompok kerja (Pokja).

Pembahasan

Dalam melaksanakan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong menggunakan mekanisme kerja dengan tahapan awal adalah : orientasi untuk memperoleh data di lapangan, melakukan koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, penancangan program dan penyiapan personil tenaga lapangan, pelaksanaan lokakarya, seminar dan pelatihan, Pelaksanaan pembentukan kelompok kerja. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berdasarkan rencana yang telah disusun, Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Penyaluran BLM melalui kegiatan penyelenggaraan lokakarya, seminar atau pelatihan, Kelompok usaha mandiri, Kelompok swadaya masyarakat, Kelompok serba usaha

Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang mencakup penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya, Penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui kesadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta

penerapan tata pemerintahan yang baik

Dalam implementasi program empat faktor yang mempengaruhi implementasi program yaitu :

a. Komunikasi

Kegiatan komunikasi yang dilakukan perangkat desa dan BPD selaku implementor program berbentuk sosialisasi program ke masyarakat. Bila sosialisasinya dapat dipahami oleh masyarakat maka tujuan program akan lebih mudah dicapai. Demikian pula sebaliknya bila sosialisasi yang dilakukan tidak dapat dipahami oleh masyarakat maka tujuan program pun akan sulit dicapai. Berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa tanggapan responden terhadap komunikasi implementor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri masih ada yang kurang paham dan tidak paham. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sosialisasi lebih lanjut dalam kegiatan program dengan kualitas dan kuantitas yang ditingkatkan. Memperbaiki koordinasi pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya agar kesalahan yang terjadi dapat diminimalkan.

b. Sumber Daya

Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Berkaitan dengan kualitas SDM implementor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Khairiyah Mandah ditemukan data bahwa kualitas SDM masih kurang baik.

Upaya perbaikan kualitas SDM dilakukan dengan mengikutkan perangkat desa dalam program pendidikan latihan, mengikuti sosialisasi program di kecamatan dan adanya tim pendamping program Semua upaya tersebut sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu program pemberdayaan direkomendasi adanya dana yang disalurkan untuk peningkatan

SDM aparatur. Diatur juga sosialisasi program ke desa oleh kecamatan serta disediakan tim pendamping perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana tujuan program adalah dorongan untuk swadaya gotong royong masyarakat. Namun kenyataannya upaya untuk menggali sumber dana dari masyarakat kurang optimal karena masyarakat cenderung apatis dan tidak peduli dengan upaya pengembangan pembangunan di desa agar menjadi desa mandiri.

Upaya untuk menggali sumber daya finansial swadaya masyarakat adalah dengan sosialisasi program, cara bersosialisasi yang berkualitas, kuantitas komunikasi, perbaikan pendidikan dan perbaikan perekonomian. Bentuk nyata upaya adalah bantuan pengembangan pendidikan melalui anggaran dana desa dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Berkaitan dengan hasil tersebut ditemukan data bahwa masih ada 20% yang menyatakan disposisi implementor kurang baik.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melibatkan sebagian masyarakat terlibat dengan program pemberdayaan ini yang disebut dengan POKJA (kelompok kerja). Masyarakat terpilih harus memiliki disposisi yang baik guna mendukung persepsi positif masyarakat terhadap implementor program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Bentuk upaya lain adalah adanya laporan pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ditingkat desa untuk program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya terdiri dari : Kepala desa, Sekretaris

Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kelompok kerja (Pokja). Struktur birokrasi sudah dibuat dengan petunjuk teknis pelaksanaan program. Diisi oleh personel yang mempunyai komitmen dan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Masalah ketidaksesuaian struktur tersebut berkaitan dengan personel yang mengisi structural tersebut. Upaya yang dilakukan adalah seleksi implementor program serta menyertakan sebagian masyarakat terlibat dalam structural tersebut. Kendala lain yang dihadapi yaitu syarat administrasi pencairan dana yang kompleks kadang menyulitkan personel untuk membuat syarat administrasi tersebut. Kesulitan tersebut berpengaruh pada keterlambatan pencairan aliran dana desa. Upaya yang dilakukan adalah menyertakan perangkat desa dalam sosialisasi program yang diberikan kecamatan. Melakukan diskusi internal perangkat desa sehingga bisa saling tukar pikiran. Memperjelas tugas dan fungsi masing-masing personel perangkat desa serta memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan kecamatan.

SIMPULAN

Penelitian Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan yang terdiri dari perencanaan, organisasi pelaku, persiapan dukungan anggaran, partisipasi masyarakat dan hasil-hasil program dan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menuju desa mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir melalui tahapan : Orientasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berkoordinasi dengan perangkat desa (2) Pencanangan program Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (3) Pelaksanaan lokakarya, seminar dan pelatihan Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (4) Pelaksanaan Block Grant (5)Penyaluran Dana Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri meliputi

- a. Faktor komunikasi, Komunikasi diperlukan untuk koordinasi, baik kooordinasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal dilakukan dengan personel yang ada dalam struktural program sedangkan komunikasi eksternal dengan struktural diatas desa yaitu kecamatan serta komunikasi yang dilakukan dengan warga masyarakat desa.
- b. Faktor Sumber Daya Manusia, Kualitas SDM implementor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Teluk Belengkong masih ada yang kurang baik dan tidak baik kualitasnya. Perlu usaha yang selektif untuk memilih implementor Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya
- c. Disposisi, Masih ada disposisi implementor kurang baik, perlu adanya upaya memperbaiki watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Karena dimensi tersebut merupakan dimensi disposisi implementor program. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melibatkan sebagian masyarakat terlibat dengan program pemberdayaan ini yang disebut dengan POKJA (kelompok kerja). Masyarakat terpilih harus memiliki disposisi yang baik guna mendukung persepsi positif masyarakat terhadap implementor program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.
- d. Birokrasi, Kelembagaan dan SOP program pemberdayaan masyarakat desa sudah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. Untuk program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya ditingkat desa terdiri dari : Kepala desa, Sekretaris desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (BPD),

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kelompok kerja (Pokja).

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda. Bandung.
- Awang, San Afri, 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT: Studi Kasus Tipologi Desa Hutan di Kabupaten Madiun". Dalam Mubyarto (ed.), *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media. Jakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. 2010. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010*. Badan PMD Indragiri Hilir.
- Bryant, C., & L.G. White, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES. Jakarta.
- Buchori, Mochtar, 1993. *Pengantar Dalam Walter Fernandes dan Rajesh Tandon (eds.) Riset Partisipatoris-Riset Pembebasan*. Penyunting: Wardaya dan Hardiman. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Bungin, Burhan (ed.). 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Depdagri, 1994. *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Fitryani, Vivin dan Muhammad Yakub. 2017. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 14 No

- 1, April 2017 halaman 77-94
- Goulet, Denis, 1977. *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*. New York: Atheneum.
- Hakim, Abdul. 2008. *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan*. Bayumedia. Malang.
- Hoessein, Benyamin. 1993. Reaktualisasi Kewenangan Otonomi Daerah. Naskah Lokakarya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri. Jakarta 1 Desember 1999.
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2005. *Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Moeljarto, 1996. Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT". Dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranaka (eds.), 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nazrizal, 1999. *Pemberdayaan Penakik Damar di Desa Pasa Bukik Kabupaten Pesisir Selatan*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bina Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Trilaksono. 2000. Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, September 200. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Univ. Brawijaya. Malang.
- Nurkse, Ragnar, 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford University Press. New York.
- Patton, Adri. 1997. *Peran Pemimpin Informal dalam Pembangunan Daerah*. Disertasi. Program Pascasarjana. FE Universitas Brawijaya. Malang.
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, 2010. *Gerbang Dema Sebagai Model Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir*. Badan PMD Indragiri Hilir.
- Pitono, Andi dan Kartiwi. 2016. Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Politikologi* Vol. 3 No. 1 Oktober 2016 halaman 27 - 37.
- Siagian, Sondang P., 1991. *Perencanaan Pembangunan: Suatu Pengantar*. Semarang: Satya Wacana.
- Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Dalam D.C.Korten dan Sjahrir (eds), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Suwarsono, dan Alvin Y. SO, 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman dengan Pusat Pengembangan Teknologi dan Penerapan Hasil Penelitian Provinsi Kalimantan Timur, 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Gerbang Dema di Kabupaten Indragiri Hilir*. Laporan Penelitian. Samarinda: LP2M Universitas Mulawarman.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Utomo, Budi. 2007. Ruang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan". Diakses melalui (<http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>). Juli 2008.